

SUMMARY DISTRICT CITIZEN ENGAGEMENT PLAN

PROPINSI NUSA TENGGARAN BARAT – PULAU LOMBOK

Kabupaten Lombok Tengah

Visi Kabupaten

Terwujudnya SDM yang kreatif dan berkualitas di Loteng, dengan tetap mengedepankan moral dalam pergaulan di tengah arus globalisasi. Dimana semua anak usia sekolah baik laki maupun perempuan harus bersekolah sehingga tidak ada lagi yang terlantar dan tidak bersekolah. Masyarakat miskin terlayani dalam pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Petani semakin berdaya, sejahtera dan mandiri dalam mewujudkan swasembada pangan dan pengembangan unit-unit usaha industri lokal yang berdaya saing.

Pemerintah menjalankan fungsinya sebagai pelayan masyarakat yang baik dan amanah secara transparan dan akuntabel dengan penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu. Pelaksanaan pembangunan dari perencanaan, penganggaran dan pengawasan yang partisipatif, demokratis serta berpihak kepada masyarakat miskin dan perempuan.

Membangun kewilayahan secara proporsional, berkualitas, berwawasan lingkungan sehat, dengan tidak mengesampingkan kearifan lokal yang baik bagi masyarakat.

Pengelolaan dan pemanfaatan SDA dilaksanakan secara partisipatif, efektif dan efisien dalam mendorong kemandirian dan keberlanjutan pembangunan di kabupaten Lombok Tengah.

Agenda Bersama Kabupaten

1. Pemenuhan hak-hak dasar warga agar menjadi warga yang berkualitas.
2. Hutan Rinjani dan Mareje Bonga' Lestari, Masyarakat yang ada di kawasannya sejahtera.
3. Pengembangan pariwisata Lombok Tengah berbasis sumber daya lokal menjadi icon pariwisata Indonesia yang dikelola secara profesional.
4. Mewujudkan Lombok Tengah sebagai Lumbung pangan dan daging di NTB 2010.

Kabupaten	: Lombok Tengah
Nama Lembaga	: Berugak Dese
Judul Concept Paper	: Penguatan Kapasitas Kader Kesehatan Dalam mendorong peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Kecamatan Kopang Rembiga
Durasi program	: 18 bulan

Berugak Dese, sebagai organisasi warga yang menjadi bagian dari pencapaian visi bersama kabupaten Lombok Tengah merancang rencana aksinya untuk memperkuat warga yang menjadi kader kesehatan meningkat kapasitasnya sehingga mampu memfasilitasi dan mendorong warga berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi upaya mendorong peningkatan PHBS; mampu mengontrol layanan kesehatan, membangun keswadayaan dalam membangun PHBS, membangun kesempatan bagi kader kesehatan, pemerintah desa serta actor pelayan dan pemerhati kesehatan dalam membangun proses transformasi informasi dan ketrampilan serta komunikasi yang efektif serta membangun jaringan dengan stakeholder lain untuk mendorong peningkatan PHBS. Rencana aksi ini akan dikembangkan di lima desa (desa Kopang Rembiga, Desa Bebuak Desa Lendang Ara, Waja Geseng, Montong Gamang) di Kecamatan

Kopang Rembige. Strategi dalam mewujudkan rencana aksi meliputi penguatan kapasitas, pengembangan jaringan kerja, dan mendorong munculnya Pusat Pelayanan Terpadu untuk Perempuan dan Anak. Pelaksanaan rencana aksi ini diharapkan dapat bersinergi dengan empat elemen utama dalam TKLD, khususnya dalam peningkatan kualitas layanan public dan partisipasi. Arah strategis rencana aksi ini berada dalam arah yang sama dengan ACCESS tahap II yakni pemberdayaan fasilitator desa agar mampu mendorong partisipasi warga, melakukan aksi interaksi dengan stakeholder lain untuk mewujudkan tujuan rencana aksi dan memperluas pengaruh di lima desa lainnya.

Kabupaten : **Lombok Tengah**
Nama Lembaga : **Konsorsium Lombok Tengah**
Judul Concept Paper : **Mendorong Percepatan Pembangunan Melalui Penguatan Institusi Lokal dan Advokasi Kebijakan hak-hak Dasar di Lombok Tengah**
Durasi program : **30 bulan**

Rencana aksi Konsorsium Lombok Tengah memiliki tujuan untuk memperkuat kapasitas institusi lokal (kelompok fasilitator desa dan fasilitator pendukung) dalam mengawal kebijakan anggaran agar berpihak pada perempuan dan warga miskin. Mendorong institusi lokal tersebut melakukan aksi interaksi untuk mempengaruhi penentu kebijakan transparan dalam pelaksanaan dan penggunaan dana pendidikan, kesehatan gratis, infrastruktur, ekonomi dan pemberdayaan. Mendorong peningkatan peran dan partisipasi warga dalam pengawasan pelaksanaan dan anggaran dalam bidang-bidang diatas, menerapkan nilai-nilai transparansi, demokratisasi dan keberpihakan kepada warga miskin dan perempuan dalam aturan-aturan lembaga anggota konsorsium. Konsorsium Lombok Tengah akan menggunakan strategi pengembangan kapasitas, analisis anggaran dan kebijakan public, advokasi kebijakan dan pembentukan unit pengaduan masyarakat. Rencana aksi ini ingin berkontribusi pada terwujudnya aspek partisipasi, transparansi dan akutabilitas, peningkatan kualitas pelayanan public dan keadilan sosial. Sinerginya dengan ACCESS Tahap II terletak pada upayanya untuk mendorong pemberdayaan pada fasilitator desa dan fasilitator kecamatan agar mampu memperkuat warga dalam melakukan aksi interaksi untuk perubahan kualitas hidupnya, Rencana aksi ini juga memiliki dampak yang luas karena dikembangkan di 7 Kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah yakni Kecamatan Praya Timur, Batukliang Utara, Praya Barat Daya, Pringgarata, Jonggat, Janapriya dan Praya Tengah.

Kabupaten : **Lombok Tengah**
Nama Lembaga : **ASPPUKK (Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil) JARPUK (Jaringan Perempuan Usaha Kecil) Nusa Tenggara.**
Judul Concept Paper : **Penguatan Perempuan Usaha Kecil Mikro Melalui Pengembangan Jejaring Usaha Berbasis Sumberdaya Lokal Mandiri Berkelanjutan**
Durasi program : **30 bulan**

ASPPUKK-JARPUK mengusulkan sebuah rencana aksi yang bertujuan untuk mendorong Perempuan Usaha kecil Mikro (PUK-Mikro) dan organisasinya kuat dan mandiri dalam mendorong terwujudnya pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis hak-hak perempuan, demokratis, sejahtera, egaliter, setara dan berkeadilan gender di kabupaten Loteng-Lobar. Harapannya melalui rencana aksi ini akan menghasilkan usaha/ekonomi perempuan usaha kecil dapat berkembang, Perempuan Usaha Kecil mengembangkan dengan Lembaga Keuangan Perempuan Usaha Kecil sebagai lembaga keuangan alternatif. Dimana LKPUK yang dikembangkan tidak hanya menjawab persoalan ekonomi akan tetapi dapat menjawab persoalan-persoalan yang menyangkut pendidikan, kesehatan,

penguatan aset-aset bagi perempuan. Di level yang lebih luas rencana aksi ini diharapkan mampu menghasilkan adanya perubahan perilaku di masyarakat, pemerintah dan swasta untuk mencintai wisata budaya dan produk lokal, adanya kebijakan ekonomi yang memberikan ruang bagi PUK dan organisasinya untuk peningkatan keberdayaan perempuan. Di atas itu semua, gerakan ini dapat mendorong menguatnya gerakan perempuan usaha kecil berbasis gerakan dalam mendorong tata pemerintahan lokal demokratis di kabupaten Loteng-Lobar. Rencana Aksi ini akan menggunakan strategi pengembangan usaha/ekonomi dan manajemen usaha PUK, advokasi dan penguatan kapasitas PUK. Rencana Aksi ini sesuai dengan arah strategis ACCEE tahap II dalam memperkuat perempuan yang bergabung dan Perempuan Usaha Kecil (PUK) melakukan aksi interaksi dengan stakeholder lainnya dalam rangka meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial perempuan miskin.

Kabupaten : **Lombok Tengah**
Nama Lembaga : **Asosiasi Marije Bonga (AMB)**
Judul Concep Paper : **Mendorong Percepatan Legalitas Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat di Kawasan Mareje Bonga Menuju Tata Kelola Hutan yang Demokratis, Mensejahterakan Masyarakat dan Berkelanjutan**
Durasi Program : **3 tahun**

Rencana aksi ini memiliki tujuan jangka panjang mendukung terwujudnya tata kelola hutan kawasan Mareje Bonga yang demokratis, mensejahterakan masyarakat dan berkelanjutan. Sementara tujuan jangka menengah dari program ini adalah adanya legalitas pengelolaan hutan oleh masyarakat di kawasan hutan Mareje Bonga. Strategy yang hendak dipergunakan untuk mencapai tujuan tersebut melalui pengembangan manajemen internal kelembagaan AMB dalam menerapkan prinsip-prinsip democratic governance dan inklusif jender dan social serta penguatan kapasitas terkait dengan perancangan pengelolaan hutan secara transparan, partisipatif, akuntabel dan berkelanjutan. Strategy lainnya adalah penguatan kapasitas pengorganisasian warga kawasan sehingga memiliki kemampuan perencanaan pengelolaan hutan dan berinteraksi dengan rencana-rencana pembangunan desa dan program pembangunan lain sehingga terjadi integrasi perencanaan kawasan dengan perencanaan desa maupun perencanaan tata kelola hutan secara keseluruhan di kawasan Marije Bonga. Prinsip pemberdayaan warga kawasan yang notabene berada pada pihak yang tidak diuntungkan oleh tata kelola hutan dan penguatan kapasitas warga dan organisasinya agar dapat berinteraksi dinamis mempengaruhi kebijakan tata kelola hutan inilah yang dipandang sejalan dengan ACCESS Tahap II.